



Beban Adminstrasi Keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

Gaung Fathi Kalami¹, Hanif Hafani²

^{1,2}Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Received: 01 Juni 2024

Revised: 08 Juni 2024

Accepted: 15 Juni 2024

This study aims to identify the financial administration burdens borne by the Semarang Regency Regional Finance Agency and analyse the constraints faced in its management. This research focuses on two main aspects: first, identifying the types of financial administration burden managed by Semarang Regency's Regional Finance Agency, including the collection and management of local revenues, expenditures and disbursements, and financial reporting; second, analysing the constraints that affect the management of financial administration burden, both from internal organisational aspects such as systems and procedures that are not yet well integrated, as well as external factors such as changes in central government policies and regulations that have an impact on local finances. This research uses a qualitative research method with an interview approach as one of the main techniques. Through in-depth interviews with relevant parties, the researcher is expected to gain an in-depth understanding of the dynamics of financial management at the Semarang Regency Regional Finance Agency and extract relevant information to formulate constructive recommendations to improve the efficiency and effectiveness of regional financial management.

Keywords: Administrative burden, Finance, Semarang Regency Regional Finance Agency

(*) Corresponding Author: gaungnasution@students.unnes.ac.id

How to Cite: Kalami, G. F., & Hafani, H. (2024). Beban Adminstrasi Keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12747365>.

PENDAHULUAN

Kamus bisnis online mengatakan biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan manajemen dan administrasi sehingga dapat dibebankan kepada perusahaan. Ini berbeda dengan biaya jenis lainnya, seperti biaya penjualan, produksi, atau yang lainnya.

Selain itu, ada beberapa individu yang menganggap biaya administrasi ini sebagai biaya yang berkaitan dengan penentu kebijakan atau perencanaan perusahaan. Perbedaannya terletak pada tujuan dana digunakan. Sama seperti biaya produksi yang dikeluarkan untuk tujuan produksi, biaya administrasi adalah biaya administrasi perusahaan. Karena perusahaan pasti membutuhkan biaya administrasi, peran administrasi sangat penting.¹

¹ Apa Itu Beban Administrasi dalam Membangun Usaha. (2020, August 30). Fakultas Ekonomi. Retrieved November 29, 2023, from



Beban administrasi tidak sama dengan beban lainnya, seperti produksi dan penjualan. Biaya yang terkait dengan penentuan kebijakan oleh pengusaha atau perencana juga dapat dianggap sebagai beban administrasi. Setiap perusahaan memiliki biaya administrasi yang harus dibayar, seperti halnya biaya produksi, yang dapat diartikan sebagai biaya produksi. Salah satu contoh biaya administrasi adalah biaya sewa, yang biasanya ada di perusahaan baru. Biaya sewa dapat berupa sewa tanah, perlengkapan atau penyewaan yang lainnya. Biaya sewa ini termasuk dalam biaya administrasi perusahaan. Contoh lainnya, seperti gaji, termasuk gaji manajer dan karyawan. Selain itu, tugas administrasi juga termasuk dalam gaji administrator umum.

Berikut adalah beberapa langkah untuk mengatasi beban administrasi:

- Membagi Dana sesuai Jenisnya: bertujuan untuk memberikan tugas administrasi pada bagian tertentu dari perusahaan. Alokasi dana yang digunakan memiliki acuan atau dasar. Adalah adanya tingkat perubahan administrasi pada kegiatan tertentu yang menjadi dasar alokasi dana tersebut. Selain itu, ada hubungan antara beban administrasi dan beban umum, serta pengendalian pengeluaran yang didasarkan pada keadaan keuangan perusahaan.
- Menggolongkan Biaya Administrasi dan Umum: Ini memiliki dua keuntungan jika Anda dapat membagi biaya administrasi umum dan biaya administrasi perusahaan. Pertama, Anda akan memiliki dasar untuk membandingkan biaya administrasi umum dan biaya administrasi perusahaan. Lebih mudah bagi bisnis untuk membagi dana sesuai dengan divisi mereka.

Secara garis besar, fungsi beban administrasi terutama berkaitan dengan perencanaan dan kebijakan perusahaan. Fungsi ini sangat penting bagi sebuah perusahaan. Jika tidak ada, organisasi akan kehilangan keseimbangan dan menghadapi banyak masalah. Sebuah perusahaan akan mendapatkan dua hasil dari penerapan fungsi ini dengan baik: pengawasan yang efektif dan pengawasan yang efisien. Kedua fungsi ini sangat penting untuk produksi dan pemasaran.

Dalam proses produksi, pengawasan yang efektif dan efisien akan memastikan bahwa produk yang dihasilkan mencapai tingkat output yang optimal. Misalnya, sebuah perusahaan menggaji seorang karyawan untuk bekerja enam jam sehari, tidak termasuk istirahat dan waktu ibadah; satu karyawan dapat menghasilkan lima produk dalam satu hari. Perusahaan dapat mengoptimalkan kemampuan karyawannya jika tanggung jawab administrasi diterapkan dengan baik.

Namun, dalam pemasaran, administrasi memiliki peran yang sangat erat karena berurusan dengan uang. Sebuah perusahaan tidak dapat melakukan pemasaran tanpa dana. Tim pemasaran akan berusaha memasarkan sebanyak mungkin produk kepada sebanyak mungkin pelanggan, dan ini akan membutuhkan dana. Jika pemasaran produk tidak dilakukan secara langsung kepada pelanggan,

beban administrasi tetap akan ada. Dengan banyaknya platform sosial media yang dapat diakses, perusahaan harus mengatur pengeluaran mereka. Tim marketing perusahaan ini akan lebih baik melakukan tugas yang efektif dan efisien. Ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk mengawasi beban administrasi sebuah perusahaan, misalnya:

1. Menggolongkan biaya administrasi dan umum:

Secara umum, perusahaan dapat memperoleh dua keuntungan jika berhasil mengklasifikasikan biaya administrasi dan umum secara tepat. Keuntungan pertama akan memberi Anda dasar untuk membandingkan biaya administrasi dengan biaya umum perusahaan, dan keuntungan kedua akan memudahkan untuk membagi dana ke setiap bagian atau divisi perusahaan. Gaji dan upah, kesejahteraan karyawan, biaya maintenance atau perawatan, penyusutan aktiva tetap, dan biaya administrasi umum lainnya adalah beberapa kelompok biaya yang harus Anda ketahui saat mengklasifikasikan beban administrasi.

2. Membagi dana sesuai dengan jenisnya:

Tujuan dari membagi dana sesuai dengan jenisnya adalah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tugas administrasi tertentu di bagian tertentu dari perusahaan. Tidak diragukan lagi, pembagian biaya ini memiliki beberapa dasar yang dapat digunakan sebagai referensi. Yang pertama menunjukkan seberapa banyak beban administrasi berubah sesuai dengan kegiatan tertentu. Yang kedua menunjukkan hubungan antara beban administrasi dan beban umum, dan yang ketiga menunjukkan bagaimana kondisi keuangan atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berhubungan dengan beban administrasi.

3. Menentukan teknik terbaik untuk pengawasan biaya administrasi:

Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada beberapa cara yang dapat Anda gunakan untuk mengawasi tanggung jawab administrasi. Yang pertama adalah mengatur dana. Saat akhir periode, setiap divisi harus membuat laporan neraca yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode pengawasan standar adalah metode yang kedua. Pengawasan standar ini meningkatkan efisiensi operasi tanggung jawab administrasi. Caranya adalah dengan mengaitkan prestasi dan kegiatan dengan biaya yang diharapkan akan terjadi atau diperlukan.²

Berbagai kegiatan dan acara yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang membutuhkan administrasi. Serta BKUD adalah Lembaga yang bertanggung jawab untuk membantu kepala daerah (bupati atau walikota) dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan adalah Badan Keuangan Daerah BKUD menyusun rencana kerja, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, evaluasi, pelaporan, dan tugas lain yang diberikan oleh atasan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

² *Apa Itu Beban Administrasi?* | *SimulasiKredit.com*. (n.d.). Simulasi Kredit. Retrieved November 29, 2023, from <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-beban-administrasi/>

Menurut data yang dikumpulkan, struktur organisasi BKD biasanya terdiri dari sekretariat, bidang-bidang seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), pajak dan retribusi daerah, pendapatan tambahan, anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, aset, dan jabatan fungsional. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap bidang melakukan tugas dan fungsi tertentu.³

Berikut tugas utama BKUD:

1. **Perencanaan Anggaran:** membuat anggaran yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan sumber pendanaan.
2. **Pengelolaan Keuangan:** Mengawasi pendapatan dan pengeluaran daerah, termasuk pemungutan pajak dan penerimaan dari sumber-sumber lain. Ini juga mencakup pembagian dana untuk berbagai kebutuhan.
3. **Pembukuan dan Pelaporan:** Mencatat secara akurat transaksi keuangan dan memberikan laporan keuangan yang jelas dan terbuka kepada pihak terkait, seperti pemerintah pusat, legislator, dan masyarakat umum.
4. **Pengawasan dan Evaluasi:** Memeriksa penggunaan dana publik, memastikan kepatuhan terhadap aturan, dan menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan.
5. **Penyusunan Kebijakan Keuangan:** Berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan efisiensi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa saja beban administrasi keuangan yang ditanggung oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan beban administrasi keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau kemanusiaan dari sudut pandang subjektif para partisipan. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data non-numerik seperti kata-kata, gambar, atau objek, dan seringkali melibatkan metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.⁴

³ Tugas, Pokok dan Fungsi BKAD. (2020, March 9). Badan Keuangan dan Aset Daerah. Retrieved December 1, 2023, from <https://bkad.malangkab.go.id/pd/slug?title=tupoksi-2>

⁴ Diakses dari [Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Karakteristik & Jenis - serupa.id](#) , pada 2 Desember 2023

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan informasi sedetail-detailnya. Semakin mendalam data yang diperoleh, maka semakin bagus kualitas penelitian tersebut. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada banyaknya data, penelitian kualitatif memusatkan pada seberapa lengkap dan dalam informasi yang didapatkan peneliti.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Beban administrasi Keuangan yang ditanggung oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang**

Beban administrasi keuangan yang ditanggung oleh Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang mencakup berbagai aspek, seperti:

1. **pengelolaan pajak daerah:** Pajak daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program, layanan publik, infrastruktur, dan kegiatan pembangunan. Pengelolaan pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan pajak yang diterapkan di tingkat lokal atau regional. BKUD Kabupaten Semarang mengelola pajak daerah yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan. Peran BKUD dalam pengelolaan pajak daerah antara lain:
 - Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - Pendataan dan Registrasi Wajib Pajak
 - Pengumpulan Pajak
 - Peran BKUD dalam pengelolaan pajak daerah antara lain:
 - Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - Pendataan dan Registrasi Wajib Pajak
 - Pengumpulan Pajak
2. **Penyerahan sertifikat hak atas tanah:** Dalam kebanyakan kasus, Badan Keuangan Daerah (BKUD) tidak terlibat secara langsung dalam proses penyerahan sertifikat hak atas tanah; namun, dalam beberapa kasus, BKUD dapat memiliki peran terbatas terkait dengan aspek keuangan yang terkait dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Peran BKUD dalam penyerahan sertifikat hak atas tanah bisa meliputi:
 - **penerimaan Pajak Terkait Transaksi Tanah:** Jika terjadi transaksi tanah yang mengakibatkan perpindahan hak atas tanah, BKUD dapat terlibat dalam proses penerimaan pajak yang terkait dengan transaksi tersebut. Ini termasuk pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH) dari transaksi jual beli tanah atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - **Pendapatan dari Penjualan Sertifikat Tanah:** Penerbitan sertifikat hak atas tanah kadang-kadang dapat menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah. BKUD bertanggung jawab untuk mengelola

⁵ Diakses dari [Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis & Contoh \(brainacademy.id\)](https://brainacademy.id), pada 2 Desember 2023

pendapatan untuk dialokasikan ke kas daerah atau untuk program pengembangan dan lainnya.

Dalam hal penyerahan sertifikat hak atas tanah, tugas BKUD lebih banyak terkait dengan lembaga atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pertanahan, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau dinas pertanahan setempat. Ini terlepas dari fakta bahwa tugas BKUD terbatas pada aspek keuangan. Namun, BKUD harus mengelola pajak transaksi tanah dan memanfaatkan pendapatan dari transaksi tersebut untuk membiayai program pembangunan serta kebutuhan keuangan pemerintah daerah terkait pertanahan.

1. **Pendapatan pajak bumi dan bangunan:** Pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKUD). PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak daerah.

Selain itu, BKUD Kabupaten Semarang juga menjaga beberapa fungsi administrasi keuangan, seperti:

- Penjurnalan untuk mendapatkan angka yang akurat di Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Ekuitas
- Pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
- Pengelolaan administrasi keuangan pada kantor kecamatan, seperti Kantor Kecamatan Mappakasunggu, dimana sistem akrual digunakan untuk membantu pengelolaan keuangan dalam memverifikasi pertanggungjawaban keuangan

2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan beban administrasi keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

Secara umum kendala dalam penyusunan anggaran dalam kabupaten Semarang itu adalah keterbatasan kemampuan keuangan kabupaten Semarang. Dalam Kabupaten Semarang itu punya program kegiatan sesuai visi misi bupati yang diutamakan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan itu yang utama dan masih ada yang prioritas di antaranya. Selain itu, kalau ditotalkan itu akan jauh lebih besar daripada kemampuan daerah, maka kendalanya sulit disitu. Maka dalam penganggaran itu cuma reprogram kegiatan prioritas yang bisa terhindarkan.

Selebihnya ya menyesuaikan dengan pengeluaran kemampuan ruang daerah yaitu adalah penghasilan dari pendapatan asli Daerah. Pajak di kabupaten Semarang masi terbatas jika dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Jakarta ataupun Bekasi, daerah tersebut sudah tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah sedangkan di Kabupaten Semarang masih mendapatkan bantuan karena Kabupaten Semarang masih belum bisa menghasilkan pendapatan asli Daerah yang setara dengan Pengeluarannya. Kabupaten Semarang masih meminta bantuan dana ke pemerintah pusat sebesar 75% dari anggaran yang nantinya akan diperlukan untuk kepentingan Kabupaten Semarang.

Keterbatasan tersebut berpengaruh besar dalam pengelolaan beban di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang seperti Gaji Karyawan, Anggaran Pembantu Kinerja dan Anggaran Rapat Koordinasi. Gaji Karyawan menjadi beban paling besar dan paling utama dalam Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang karena Gaji karyawan dianggarkan dari anggaran Kabupaten Daerah. Berikutnya ada Anggaran Pembantu Kinerja yaitu Belanja operasi, belanja operasi merupakan anggaran untuk mendukung kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang seperti untuk print, laptop dan dalam Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Punya tupoksi untuk kelapangan seperti bidang - bidang di dalam Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang ini untuk melakukan wajib pajak, memberikan surat teguran ataupun persyaratan administrasi lainnya ke Hotel, Restoran dan tempat wisata. Bidang-Bidang tersebut membutuhkan biaya untuk menundukung kinerjanya seperti biaya transportasi. Terakhir ada Anggaran Rapat Koordinasi, untuk membeli keperluan yang dibutuhkan saat Rapat Koordinasi seperti membeli makanan dan minuman, menyewa gedung dan lain sebagainya.

Dengan adanya kendala dalam keterbatasan anggaran akan berdampak dalam kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang yang tidak optimal. Penganggaran itu harus disesuaikan dengan prioritas yang sudah ada. Dalam Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang tidak pernah beban yang ada melebihi anggaran yang sudah ditetapkan karena dalam pencatatan beban yang dikeluarkan dan anggaran yang diberikan harus balance tidak boleh ada lebih ataupun kurang. Jika beban kurang dari yang dianggarkan maka sisa dari anggaran itu akan masuk ke dalam anggaran tahun depan. Jadi ada dana tambahan dia anggaran tahun depan karena di tahun ini masih ada sisa anggaran dalam Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang sudah menjalankan tugas dan wewenang beban administrasi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dananya dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang. BUKD memiliki kendala yaitu keterbatasannya anggaran untuk menjalankan kinerjanya dikarenakan Kabupaten Semarang belum mampu menghasilkan APBD yang setara dengan Beban yang ditanggung pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kendala tersebut menjadi tantangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dalam melakukan pelaksanaan yaitu belanja yang dilakukan secara selektif dengan memperhatikan efisiensi dan diperlukan efisiensi orang untuk menghadiri kegiatan pemerintah pusat. Contoh ketika BUKD ada undangan Jakarta dari Kementerian Keuangan, BUKD harus menetapkan berapa orang yang akan menghadiri undangan tersebut agar lebih efisien biaya dan efektif. Dengan tetap memperhatikan anggaran yang dikeluarkan Kepala BUKD memberlakukan kebijakan tersebut. Nantinya informasi atau regulasi baru yang dihadiri hanya sebagian dari BKUD lalu kepala BUKD akan melakukan sosialisasi terkait informasi atau regulasi baru kepada bidang bidang di dalam BUKD itu sendiri. Selain langkah diatas BUKD ada program optimalisasi

pajak pendapatan pajak terbantu dengan bank Jateng melalui kerjasama dengan bank Jateng dengan cara adanya Mobil kas keliling untuk membayarkan pajak kepada pemerintah daerah. Kedua langkah tersebut merupakan langkah yang baik karena efisiensi waktu, tenaga dan penegaluaran anggaran akan tidak lebih daripada pendapatan Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Website

- Apa Itu Beban Administrasi dalam Membangun Usaha.* (2020, August 30). Fakultas Ekonomi. Retrieved November 29, 2023, from <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/349-apa-itu-beban-administrasi-dalam-membangun-usaha>
- Apa Itu Beban Administrasi? | SimulasiKredit.com.* (n.d.). Simulasi Kredit. Retrieved November 29, 2023, from <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-beban-administrasi/>
- Tugas, Pokok dan Fungsi BKAD.* (2020, March 9). Badan Keuangan dan Aset Daerah. Retrieved December 1, 2023, from <https://bkad.malangkab.go.id/pd/slug?title=tupoksi-2>
- Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Karakteristik & Jenis.* (2022, April 27). Diakses dari [Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Karakteristik & Jenis - serupa.id](#), pada 2 Desember 2023
- Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis & Contoh.* (2023, Juli 5-6) Diakses dari [Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis & Contoh \(brainacademy.id\)](#), pada 2 Desember 2023